BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu di bidang Perpajakan Seksi Ekstensifikasi Objek PBB. Pelaksanaan Kerja Praktek dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam Seksi Ekstensifikasi, khususnya mengenai kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB dengan menggunakan SISMIOP dan SIG di KPP Pratama Karees.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di bagian Seksi Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Karees. Dilaksanakan selama 30 hari tertanggal 4 Juli sampai dengan 4 Agustus 2009 setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai dari jam 07:30 s/d 16:00 WIB.

1. Minggu pertama
    a. Perkenalan dengan para pegawai di KPP Pratama Bandung Karees khususnya di Bagian Seksi Ekstensifikasi.
    b. Diberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat di KPP Pratama Karees.
    c. Diberikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Objek PBB.

d. Menginput data baru dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.

2. Minggu Kedua
   a. Menginput data Menginput data BA (Berita Acara)
   b. Mengisi Formulir SPOP yang belum lengkap.
3. Minggu Ketiga
   a. Menginput data BA (Berita Acara)
   b. Menginput data baru dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.
4. Minggu Keempat
   a. Menginput data dari Wajib Pajak yang mendaftarkan Objek Pajak baru.
   b. Menginput data BA (Berita Acara)

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Kegiatan ekstensifikasi objek PBB menggunakan SISMIOP dan SIG di KPP Pratama Karees

Kegiatan ekstensifikasi Objek PBB di kantor pelayanan pajak merupakan kegiatan memperluas cakupan pajak dengan penambahan jumlah Objek PBB. Kegiatan yang dilakukan para petugas pajak tersebut adalah kegiatan pendataan yang bisa juga dikatakan sebagai kegiatan ekstensifikasi Objek PBB.Dalam kegiatan ekstensifikasi pasti mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pekerjaan. Hambatan tersebut dapat ditemui baik saat pelaksanaan pemeliharaan basis data maupun pada saat kegiatan ekstensifikasi Objek PBB

dalam hal ini berupa kegiatan pendataan. Standar Prosedur Operasi menjabarkan Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memproses Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

   Operasi ini merupakan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk secara umum di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.Yang dimaksud dengandokumen dalam SOP ini adalah surat, laporan, formulir, kartu, daftar, dan buku yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pendaftaran Objek Pajak Baru

   Operasi ini merupakan penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya.

3. Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP

   Operasi ini merupakan penerbitan himbauan untuk mendaftarkan diri atau meminta NPWP bagi Wajib Pajak yang telah memenui syarat, namun diketahui belum memiliki NPWP.

4. Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB

   Operasi ini menguraikan tata cara pemeliharaan data objek dan subjek PBB yang berpola Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), serta penatausahaan hasil kegiatan tersebut.

5. Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak PBB

Operasi ini merupakan perubahan data akibat terjadinya mutasi subjek dan objek PBB yang diajukan Wajib Pajak.

6. Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak PBB

Operasi ini merupakan penyelesaian permohonan perubahan data akibat terjadinya mutasi subjek dan objek PBB yang diajukan Wajib Pajak (akibat adanya pemecahan dan penggabungan Objek Pajak).

7. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak

Operasi ini merupakan penyelesaian permohonan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diajukan Wajib Pajak.

Kegiatan utama yang dilakukan pegawai kantor pelayanan pajak khususnya dibidang ekstensifikasi adalah mendata dengan tujuan untuk memperoleh data objek dan subjek PBB, penilaian yang bertujuan untuk menentukan NJOPsebagai dasar pengenaan PBB, Penetapan yang bertujuan sebagai serangkaian kegiatan untuk menetapkan objek, wajib, dan besarnya PBB terutang, Penerimaan yang bertujuan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan pencatatan pembayaran atas tagihan PBB, Penagihan yang bertujuan sebagai serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan Pelayanan yang bertujuan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan yang diadukan oleh Wajib Pajak.

Keberadaan SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pendataan objek pajak PBB, dari sistem perpajakan ini diharapkan mendapatkan keuntungan di masa mendatang, para pegawai kantor pelayanan pajak khususnya yang menangani objek pajak pbb membutuhkan kecepatan, keakuratan,

kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka SISMIOP memasukkan program komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format digital. Adapun prosedur-prosedur dalam mengaplikasikan SISMIOP yang dilakukan di kantor pelayanan pajak dalam kegiatan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Pendaftaran Data Baru

   Surat permohonan dengan jenis pelayanan Pendaftaran data baru apakah akan diserahkan ke PDI (seksi Pengolahan Data dan Informasi).

2 Prosedur Mutasi Pajak / Subjek Pajak

   Surat permohonan dengan jenis pelayanan Mutasi Objek Pajak/ Subjek Pajak apakah akan diserahkan ke PDI (seksi Pengolahan Data dan Informasi).

3 Prosedur Keberatan Atas Pajak Terhutang dan Pembetulan SK Keberatan.

   a. Lakukan serah terima berkas dari PST ke Keberatan
   b. Lakukan pembetulan SK Keberatan

Setelah masing-masing seksi terkait di KP PBB selesai memproses urusan yang diajukan oleh Wajib Pajak selanjutnya hasil dari proses tersebut diserahkan kembali kepada PST untuk disampaikan kepada Wajib Pajak. Data-data yang telah didata oleh petugas pajak kemudian diolah menggunakan aplikasi SISMIOP. SISMIOP itu sendiri merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan

seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. Keberadaan SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan dimasa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka SISMIOP memasukkan program komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format *digital*. Jadi kegiatan ekstensifikasi atau pendataan objek pajak PBB di kantor pelayanan pajak pengolahan datanya menggunakan aplikasi SISMIOP agar lebih akurat dan *up to date.*

Selain menggunakan SISMIOP kantor pelayanan pajak juga menggunakan aplikasi SIG sebagai pelengkap basis data. Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi (*georeference*). SIG digunakan untuk menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi.

Sistem Informasi Geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem manual (analog) dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi manual digunakan untuk menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar

transparansi untuk tumpang susun *(overlay)*, foto udara, laporan statistik dan laporan survey lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer. Sedangkan Sistem Informasi Geografis otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi.

Komponen utama Sistem Informasi Geografis dapat dibagi kedalam 4 komponen utama yaitu: perangkat keras (*digitizer*, *scanner*, *Central Procesing Unit* (*CPU*), *hard-disk*, dan lain-lain), perangkat lunak (ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), organisasi (manajemen) dan pemakai (*user*). Kombinasi yang benar antara keempat komponen utama ini akan menentukan kesuksesan suatu proyek pengembangan Sistem Informasi Geografis.Kantor pelayanan Pajak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam Sistem Informasi Geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi.

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan

berbagai objek sebagai data spasial. Tiga cara dasar Penyajian data spasial yaitu dalam bentuk titik, bentuk garis dan bentuk area (*polygon*). Titik merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek berupa ketinggian, lokasi kota, lokasi pengambilan sample dan lain-lain. Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, kontus dan lain-lain. Sedangkan area adalah kenampakan yang dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya: batas daerah, batas penggunaan lahan, pulau dan lain sebagainya.

Sistem informasi geografi yang diolah menyajikan informasi keruangan beserta atributnya yang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu Masukan data merupakan proses pemasukan data pada komputer dari peta (peta topografi dan peta tematik), data statistik, data hasil analisis penginderaan jauh data hasil pengolahan citra digital penginderaan jauh, dan lain-lain, Penyimpanan data dan pemanggilan kembali *(data storage* dan *retrieval)* ialah penyimpanan data pada komputer dan pemanggilan kembali dengan cepat (penampilan pada layar monitor dan dapat ditampilkan/cetak pada kertas), manipulasi data dan analisis ialah kegiatan yang dapat dilakukan berbagai macam perintah misalnya overlay antara dua tema peta, membuat *buffer zone* jarak tertentu dari suatu area atau titik dan sebagainya, pelaporan data ialah dapat menyajikan data dasar, data hasil pengolahan data dari model menjadi bentuk peta atau data tabular.

Beberapa alasan mengapa perlu menggunakan SIG, diantaranya adalah SIG menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi, SIG dapat

digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi, SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data, SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada dipermukaan bumi kedalam beberapa *layer* atau *coverage* data spasial, SIG memiliki kemapuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut atributnya, Semua operasi SIG dapat dilakukan secara interaktif, SIG dengan mudah menghsilkan peta-peta tematik, semua operasi SIG dapat di costumize dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahaa script, peragkat lunak SIG menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak lain, SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial dan geoinformatika.

Maka dapat dikatakan bahwa aplikasi SIG akan memberi nilai tambah pada kemampuan pengindraan jauh dalam menghasilkan data spasial yang besar dimana pemanfaatan data pengindraan jauh tersebut tergantung pada cara penanganan dan pengolahan data yang akan mengubahnya menjadi informasi yang berguna.

3.3.2 Hambatan-Hambatan Yang Dialami Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Dengan Menggunakan SISMIOP Dan SIG Di KPP Pratama Karees.

1. Hambatan Dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Berdasaran pengalaman penulis dalam melakukan kerja praktek ada beberapa hambatan-hambatan yang ditemui. Hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor dari Wajib Pajak Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan

   Sebelum mengajukan permohonan pelayanan PBB, Wajib Pajak seharusnya melengkapi terlebih dahulu persyaratannya. Tetapi terkadang ada Wajib Pajak yang tidak melengkapi persyaratan tersebut dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani. Hal ini tentu saja akan menghambat penyelesaian urusan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut.

2. Faktor Kelalaian Pegawai KPP

   Permasalahan ini menyangkut tentang kelalaian manusia *(human error)* seperti munculnya kesalahan tulis pegawai pendata pada lembar SPOP dan LSPOP yang akan dientri. Kasus paling banyak ditemukan dan mudah dikenali adalah pada penulisan marga.Seperti marga “Sihombing” yang hanya ditulis “Sihombi” dan contoh lainnya. Atau kelalaian petugas saat memasukkan jumlah lantai

bangunan pada lembar LSPOP. Sehingga kadang ada bangunan dengan jumlah lantai seharusnya lebih dari satu hanya ditulis satu lantai. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara luas bangunan dengan luas tanah tempat bangunan berdiri.Kelalaian lainnya adalah dalam hal pengisian penjagaan. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh penulis ketika melakukan kegiatan entri data banyak objek pajak hasil pendataan lapangan yang sudah dientri kemudian muncul lagi data objek pajak yang sama tetapi hasil dari salinan data kantor.

3. Waktu penyelesaian urusan yang lama

   Untuk menyelesaikan urusan pendaftaran Objek Pajak baru, mutasi dan pembetulan, KP PBB Bandung membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Mengingat pertumbuhan Kota Bandung yang cukup tinggi dan masyaratnya yang dinamis tentu saja faktor kecepatan dan ketepatan KP PBB dalam menyelesaikan setiap urusan yang diajukan Wajib Pajak menjadi sangat penting. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi citra KP PBB karena banyak Wajib Pajak yang mengelukan tentang lamanya proses penyelesaian urusan pelayanan PBB.

2. Hambatan Dalam Yang Dialami Sistem Informasi Geografis (SIG)

Kelemahan pada sistem, setelah user melakukan penghitungan jarak lokasi dari pasar seni gabusan ke lokasi yang lain, arah yang ditunjukkan

ke lokasi belum berupa rute atau anak panah yang mengikuti jalan kesentra lokasi lain, melainkan dalam aplikasi terdapat menu layout yang menyediakan arah mata angin, yaitu barat, timur, selatan dan utara.

3.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Terhadap Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh KPP Pratama Karees Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Dengan Menggunakan SISMIOPDan SIG.

1. Dengan Menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Berbekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki, penulis mencoba memberikan beberapa alternatif pemecahan dari masalah yang tersebut di atas, diantaranya:

1. Sebaiknya disaat Wajib Pajak diharuskan melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan pelayanan PBB, seksi-seksi dalam KP PBB seharusnya lebih menekankan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani agar tidak menghambat proses pelayanannya dan demi kenyamanan semua pihak.
2. Dalam menyelesaikan pelayanan PBB seksi-seksi dalam KP PBB diharuskan agar lebih teliti pada pendataan lembar SPOP dan LSPOP dikarenakan sering terjadi kekeliruan penulisan nama/marga pada lembar SPOP, juga kesalahan memasukan jumlah lantai pada lembar LSPOP.

3. Melihat kondisi Kota Bandung dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang berdampak pada perubahan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak tentunya harus disesuaikan dengan waktu penyelesaian pelayanan yang cepat pula agar kelambanan, kelalaian, dan ketidakluwesan dalam penyelesaian tugas dapat dihindarkan. Mempercepat proses penyelesaian pelayanan dapat dilakukan dengan pembagian kerja yang efektif kepada setiap pegawai.

2. Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Berdasarkan analisa dan implementasi Sistem Informasi Georafis, sistem informasi geografis masih memiliki kekurangan, maka ditemukan alternatif pemecahan masalah dari hambatan-hambatan yang dialami, alternatif-alternatifnya adalah

1. Data yang diinputkan harus akurat terutama data spasial seperti koordinat lokasi. Hal ini berpengaruh dalam keberadaan lokasi dalam peta dan di lapangan.
2. Untuk pengembangan lebih lanjut, setelah penghitungan jarak, penunjukkan arah lokasi bisa dikembangkan menggunakan rute (misal anak panah) yang mengikuti jalan kelokasi sentra industri lain yang dituju.
3. Jika perlu, ditambahkan informasi lain yang berhubungan dengan tiap sentra industri selain informasi yang sudah ada.